

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan upaya mencapai tujuan nasional seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan merupakan proses untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sekarang. Untuk itu pembangunan yang dilaksanakan harus merata diseluruh wilayah Indonesia baik di desa maupun di kota dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuh prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk memikirkan kondisinya desanya dimasa yang akan datang, sehingga bisa bertambah maju. Untuk mewujudkan kemajuan desa dapat dilihat dari aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia. Salah satunya sumber daya manusia yang harus kita lihat adalah para penyandang disabilitas yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Penyandang disabilitas merupakan suatu kondisi adanya kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau menghambat bagi seseorang untuk melakukan aktivitas seayaknya seperti orang normal biasanya. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Permasalahan penyandang disabilitas merupakan permasalahan sosial yang harus dituntaskan, karena kondisi yang mengarah kepada pelanggaran nilai-nilai, norma serta mengakibatkan penderita emosional. Bahkan kondisi ekonomi dalam masyarakat disabilitas sendiri tidak dapat berjuang secara maksimal, dengan memiliki keterbatasan dan kemampuan intelektual yang kurang. Dalam kehidupan sehari-hari mereka mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya sikap negatif dari masyarakat kepada para penyandang disabilitas mental ternyata lebih terstigmatisasi dibandingkan dengan mereka yang mengalami disabilitas fisik. Adanya stigma tidak terhindarkan dan muncul dalam ekspresi sehari-hari seperti 'bodoh, idiot, mbambung' sehingga menciptakan batas bagi para penyandang disabilitas mental untuk berkomunikasi dengan efektif. Sehingga, sikap sosial yang negatif sering menjadikan hambatan dalam menjalankan peran sosial dan aktivitas serta akses-akses ke pelayanan sosial, selain adanya stigma negatif masyarakat para penyandang disabilitas juga mendapatkan diskriminasi ketika para disabilitas akan berpartisipasi di kegiatan masyarakat (Prakosa, 2011).

Masalah stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental mengakibatkan para penyandang disabilitas mental menjadi tidak berdaya dan tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Penyandang disabilitas mental atau keterbelakangan mental (*down syndrome*) adalah termasuk golongan penyakit genetik karena cacatnya terdapat pada bahan keturunan atau gen dimana adanya materi genetik tambahan menyebabkan keterlambatan perkembangan dan kadang mengacu pada retardasi mental (Fadhli, 2010).

Permasalahan penyandang disabilitas mental terjadi di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa desa yang mendapat sebutan “Kampung Idiot”. Tidak hanya mendapatkan sebutan Kampung Idiot namun juga muncul stigma negatif adanya bentuk diskriminatif yang diterima oleh penyandang keterbelakangan mental dalam aspek ekonomi, sosial dan politik. Mereka penyandang disabilitas semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang mereka dapatkan dan banyak yang mendapatkan penolakan sosial dari lingkungannya. Adanya 5 desa yang mendapatkan sebutan “Kampung Idiot” yaitu: Desa Dayakan di Kecamatan Badegan, Desa Sidoharjo dan Desa Krebet di Kecamatan Jambon serta Desa Karangpatihan dan Desa Pandak di Kecamatan Balong. Kelima desa mendapatkan sebutan Kampung Idiot disebabkan karena sebagian penduduk di desa tersebut penyandang disabilitas mental atau *down syndrome*. Namun dari kelima desa tersebut, Desa Karangpatihan termasuk yang terparah penduduknya mengalami keterbelakangan mental atau *down syndrome*. (Koten, Kisah Pulu Kampung Idiot di Ponorogo, 2017)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Ponorogo Tahun 2017, jumlah penduduk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan adalah 5275 jiwa, dengan laki-laki sebanyak 2634 jiwa dan perempuan 2641 jiwa, serta penyandang disabilitas mental berjumlah 87 jiwa. Berikut ini tabel jumlah penderita disabilitas di Desa Karangpatihan:

Tabel 1.1

Jumlah Disabilitas Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Balong, 2017

No	Kelurahan/Desa <i>Village</i>	Tuna Netra <i>Blinds</i>	Tuna Rungu Wicara <i>Mute Deaf</i>	Tuna Daksa <i>Body Disabled</i>	Tuna Grahita <i>Mentally Disabled</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pandak	10	3	2	5
2	Bulukidul	2	9	1	5
3	Bulak	-	1	2	-
4	Ngendut	2	3	-	6
5	Karangpatihan	19	95	35	87
6	Sumberejo	4	3	3	2
7	Ngumpul	1	5	-	5
8	Ngraket	-	-	-	-
9	Dadapan	-	-	-	2
10	Singkil	2	2	-	5
11	Karangan	-	-	-	-
12	Bajang	4	1	6	5
13	Balong	2	-	4	3
14	Jalen	-	1	-	3
15	Karangmojo	1	-	-	1
16	Sedarat	2	2	-	-
17	Purworejo	2	2	1	-
18	Tatung	-	-	2	5
19	Muneng	-	6	3	-
20	Ngampel	2	22	6	1
	Jumlah <i>Total</i>	53	155	65	135

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018

Meskipun mendapatkan sebutan Kampung Idiot dengan jumlah penderita *down syndrome* terbanyak dibanding desa lainnya, Desa Karangpatihan memiliki hal menarik yang perlu dicontoh oleh desa lainnya yaitu melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam kondisi keterbatasan yang dialami sebagian warganya menjadikan motivasi Pemerintah Desa Karangpatihan untuk membuat perubahan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakatnya khususnya bagi disabilitas mental (*down syndrome*) yang memiliki tujuan agar para disabilitas mental tidak bergantung kepada orang lain dan lebih mandiri dalam segala hal finansial maupun ekonomi.

Munculnya permasalahan stigma negatif dan diskriminasi dalam masyarakat yang dihadapi penyandang disabilitas mental diperlukan sebuah upaya khusus, salah satunya caranya melalui pemberdayaan masyarakat dengan sistem 3 konsep yaitu: bulanan, triwulan dan tahunan. Menurut Kepala Desa Karangpatihan (Bapak Eko Mulyadi) sudah menjalankan program ini sejak tahun 2013, mereka dalam pelaksanaan pemberdayaan dengan konsep bulanan penyandang disabilitas akan memperoleh hasil melalui penjualan karya kerajinan tangan yang disetor ke Pemerintah Desa, hasil penjualan mereka bisa untuk biaya mereka kehidupan sehari-hari, kemudian dengan konsep pemberdayaan triwulan penyandang disabilitas bisa mendapatkan hasilnya melalui penjualan panen ikan lele yang dijual kepada pemerintah desa setempat atau warga sekitar, sedangkan untuk konsep tahunan mereka mendapatkan hasil penjualan dari ternak indukan kambing mereka berternak dengan cara berkelompok 10 orang, dimana nanti hasilnya penjualan

indukan yang sudah besar dapat digunakan untuk membiayai kehidupan keluarganya.

Program pemberdayaan ini telah dilaksanakan Pemerintah Desa Karangpatihan yang dipelopori oleh Kepala Desa Karangpatihan Bapak Eko Mulyadi, pemerintah desa berusaha menghapus stigma negatif sebutan Kampung Idiot dengan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Melalui program pemberdayaan diharapkan penyandang disabilitas menjadi mandiri dan produktif tidak selalu ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Karangpatihan bisa dikatakan masih kurang efektif, dikarenakan pemberdayaan dengan konsep bulanan memiliki kendala dalam kebutuhan bahan untuk digunakan penyandang disabilitas seperti membuat kerajinan tangan dan kekurangan dalam alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan tangan. Konsep triwulan dengan budidaya ikan lele juga memiliki kendala, dimana Desa Karangpatihan sendiri merupakan desa yang berada di lereng pegunungan dan selalu mengalami kesulitan air bersih untuk setiap harinya. Program budidaya ikan lele juga membutuhkan air yang cukup banyak untuk setiap harinya mengakibatkan pemberdayaan ini cukup terkendala bagi mereka penyandang disabilitas. Kemudian program konsep tahunan dengan melakukan ternak kambing, juga mengalami kendala dalam segi permodalan untuk biaya membelikan kambing semakin berkurangnya pihak donatur yang memberikan bantuan membuat pemberdayaan ini juga tidak berjalan efektif.

Kemudian untuk program pemberdayaan disabilitas juga mengalami kendala setiap tahunnya yaitu permodalan, dimana sampai saat ini belum ada pihak yang menjadi donatur tetap setiap tahunnya. Maka dari pihak pemerintah desa berusaha menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan dinas terkait untuk membantu dalam hal penyediaan bahan kebutuhan dan permodalan untuk pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (*Down Syndrome*) Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (*Down Syndrome*) Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (*Down Syndrome*) Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya kajian studi ilmu pemerintahan, khususnya terkait penyandang disabilitas dan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Karangpatihan, Dinas Sosial dan Lembaga terkait dalam pengambilan program yang spesifik pada disabilitas sehingga masyarakat disabilitas menjadi lebih berdaya dan mandiri.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustakadari penelitian-penelitian sebelumnya, yang berkaitan langsung dengan latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Suluh Kusuma Dewi pada tahun 2016 yang berjudul Model Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Tunagrahita Di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masyarakat tunagrahita merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses sosial kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan dalam masyarakat tunagrahita merupakan permasalahan sosial yang mengarah kepada pelanggaran nilai-nilai, norma dan mengakibatkan emosional. Salah satu wujud upaya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat tunagrahita, maka perlu melakukan

kegiatan pemberdayaan masyarakat tunagrahita dengan memberikan pelatihan di Balai Latihan Kerja dengan melakukan pelatihan pembuatan kerajinan tangan seperti keset serta juga memberikan pemberdayaan dalam kegiatan di ternak lele dan pemberdayaan ternak ayam, sehingga hasil dari pemberdayaan yang dihasilkan oleh masyarakat tunagrahita dapat dilakukan secara berkelanjutan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Susilawati pada tahun 2016 yang berjudul Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Miskin Dan Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif “Limbah Singkong Di Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat lemah hendaknya terus dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat miskin penyandang *disabilitas*, terutama masyarakat yang keluarganya mengalami cacat mental atau cacat yang lainnya dapat terwujud. Adanya pembinaan dan dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap wirausaha-wirausaha masyarakat miskin penyandang. Pemberdayaan ini ditujukan untuk kelompok masyarakat yang lemah yaitu masyarakat miskin penyandang *disabilitas*, agar dapat mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. penyandang *disabilitas* yang dapat diikutsertakan program pemberdayaan masyarakat ini adalah hanya penyandang *disabilitas* dengan usia produktif dengan kategori tingkat kecacatan ringan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Okky Sepprian dan Theresia Indrawati pada tahun 2018 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Rumah Harapan dalam Memberikan *Life Skill* Kerajinan Tangan Warga Tunagrahita Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hasil dari adanya pemberdayaan dalam memberikan life skill kerajinan tangan melalui rumah harapan telah memberikan implikasi pada warga tunagrahita yaitu: kemampuan membuat kerajinan tangan, partisipasi kehidupan sosial. Dari hasil yang diperoleh tersebut disarankan kepada pihak pengelola rumah harapan agar semakin baik dalam menyiapkan program pemberdayaan, terutama mendatangkan fasilitator profesional di bidangnya sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hanif pada tahun 2016 yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Memberdayakan Warga Retardasi Mental Dengan Model Asanti Emotan (Studi Kasus Di Sidoharjo Jambon Ponorogo). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat reterdasi mental atau tunagrahita yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan kegiatan Model Asanti Emotan dalam bentuk kegiatan untuk membantu masyarakat tunagrahita dalam mengembangkan pibadi, kehidupa keluarga dan kehidupan sosial melalui pembiasaan, pengertian, pemodelan dan penguatan sehingga lebih berdaya dan mandiri. Partisipasi masyarakat normal dalam kegiatan tersebut cukup aktif dalam kegiatan merencanakan

Model Asanti Emotan dalam melaksanakan program dan mengevaluasi program. Keterlibatan masyarakat normal dalam pelaksanaan Model Asanti Emotan untuk masyarakat tunagrahita diwujudkan dengan berbagai bentuk bantuan yaitu harta benda, pemikiran dan uang mereka cukup aktif dalam pemodalan, ketrampilan dan fasilitator masyarakat tunagrahita.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rodhotul Munawaroh, Refti Handhini Listyani pada tahun 2016 yang berjudul Praktik Sosial Pemberdayaan Masyarakat Miskin Idiot Melalui Model Kerajinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan mental yang dialami. Dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata sosial membantu supaya bisa menanamkan nilai-nilai modern dengan bekerja keras, serta dalam pemberdayaan tersebut juga memberikan pelatihan motivasi supaya mereka tidak mudah putus asa.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Andriana pada tahun 2017 yang berjudul Kesejahteraan Sosial Tunagrahita Di Ponorogo. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hubungan relasi masyarakat tunagrahita kategori ringan dan sedang dengan masyarakat normal di Dusun Tanggungrejo masih berfungsi secara baik dan tidak pernah terjadi konflik sosial dengan masyarakat. Mereka memiliki hubungan saling timbal balik dalam hal

kebutuhan sehari-harinya dalam hal bekerja bersamaan sehingga mereka bisa melakukan aktifitas seperti masyarakat normal. Berbeda dengan masyarakat tunagrahita yang kategori berat mereka masih bisa beraktifitas seperti masyarakat normal, tetapi untuk masyarakat tunagrahita berat mereka tidak mampu bekerja dan mereka hanya bergantung pada orang lain atau keluarganya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung Sekar Arum, Rina Herlina Haryanti pada tahun 2017 yang berjudul Program Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Melalui Kerajinan Keset Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa program pemberdayaan yang ditujukan khususnya untuk masyarakat tunagrahita memang berbeda dengan pemberdayaan yang ditujukan untuk masyarakat secara umum dengan cara 3 tahap yaitu dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Pendampingan atau pelatihan dalam berkomunikasi memberikan manfaat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tunagrahita sehingga bisa memahami apa yang diinginkan mereka dengan memiliki keterbatasan. Keikutsertaan masyarakat normal dalam membantu masyarakat tunagrahita dalam memberikan pelatihan dengan pelatihan membuat keset lebih menarik dengan cara menambahkan kreasi serta membuat kerajinan tangan lainnya. Sehingga membuat masyarakat tunagrahita menambah kreatifitas mereka dalam melakukan pembuatan kerajinan tangan.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Riyono dan Diana Setiyawati pada tahun 2017 yang berjudul Peran Karangtaruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peran karang taruna sebagai fasilitator dan kordinator. Karang taruna dalam kegiatan pemberdayaan berperan sebagai tenaga profesional atau tenaga ahli yang bertugas memfasilitasi sekaligus mendampingi pada setiap proses pemberdayaan. Peran karang taruna sebagai agen perubahan (*Agent of Change*). Kegiatan yang selama ini telah dijalankan Karang Taruna Desa Karangpatihan mampu mengubah kebiasaan yang ada dalam masyarakat yaitu, terbukanya kesempatan pemuda untuk menyampaikan gagasan kepada forum desa, pemuda menjadi pengagas dibangunnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi warga disabilitas dan pemuda dapat mendorong warga untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Iffatus Sholehah pada tahun 2017 yang berjudul Pemberdayaan Difabel Melalui *Asset Based Approach*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas melalui program *asset based approach* ini dapat dilihat dari pelatihan dan bimbingan yang diberikan. Mulai dari pelatihan kerajinan sehingga para difabel bisa memiliki modal keahlian untuk bisa berkembang secara mandiri. Hasil dari pemberdayaan tersebut bisa menambah rasa percaya

diri akan potensi yang dimiliki disabilitas memiliki kesadaran untuk bangkit dengan ketrampilan yang dimiliki.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Triono pada tahun 2018 yang berjudul Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Difabel Idiot Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam upaya peningkatan kemampuan intelektual masyarakat difabel idiot di desa Karangpatihan, dan sekaligus untuk mendukung pendanaan KSM Rumah Harapan Bangkit, kepala desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), melakukan pembudidayaan ayam potong, ayam petelur, lele, dan usaha pembuatan tusuk sate, sebagai upaya memberdayakan masyarakat difabel dalam bidang pendidikan Pemerintah Desa *Karangpatihan mendirikan PAUD "SMART" yang merupakan salah satu PAUD yang dibiayai oleh pemerintah, dan memberi prioritas sekolah gratis bagi masyarakat difabel kejenjang pendidikan hingga tingkat SMA.*

Mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai Model Pemberdayaan Terhadap Penyandang Disabilitas dan membahas terkait Mensejahterakan Masyarakat Disabilitas. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Penanganan Masyarakat Disabilitas Mental (*Down Syndrome*). Adapun permasamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini sama membahas mengenai Pemberdayaan Masyarakat.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Efektivitas

Berdasarkan Ensiklopedia Umum Administrasi dalam (Zainudin, 2014) menjelaskan bahwa efektivitas berasal dari kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan menurut (Tampubolon, 2011) juga menjelaskan bahwa efektivitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana target kualitas, kuantitas, dan waktu berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimana semakin tinggi tingkat pemarsentase yang dicapai berarti semakin tinggi juga tingkat efektivitasnya.

Menurut pendapat Thoha dalam (Nasila, 2014) efektivitas merupakan suatu kegiatan Usaha bersama yang dikelola melalui kelompok yang terorganisir dalam suatu struktur, baik yang berorientasi pada kepentingan bersama maupun kepentingan golongan, keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dinyatakan “efektif”

Menurut (Zainudin, 2014) bahwa efektivitas dapat didefinisikan menjadi 4 hal yaitu:

- a. Mengerjakan sesuatu dengan benar yang sesuai dengan peraturan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Mampu mencapai tingkat di atas pesaing, yang dimana dapat menjadikan yang terbaik diantara yang terbaik.

- c. Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat berdasarkan sesuatu yang telah dikerjakan.
- d. Mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Sedangkan efektivitas merupakan bentuk dari hubungan antara output dengan tujuan yang semakin tinggi kontribusi dari output maka selain besar pencapaian tujuan tersebut. Menurut Drucker dalam (Zaenudin, 2014) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan bentuk kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang benar dengan tingkat ukuran sejauh mana dalam melakukan sesuatu dengan benar.

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Moore D. Kenneth dalam (Moh Syarif, 2015) efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, atau makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Menurut pendapat (Pasaribu, 2017) mengatakan bahwa efektivitas dalam sudut pengguna adalah terpenuhinya keinginan dan harapan dari pencarian informasi yang mereka butuhkan. Sedangkan efektivitas dari sudut pandang perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan prosedur dan mekanisme operasional yang dibenarkan sehingga tercapai suatu kepuasan yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat (Mahmudi, 2010) efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Ravianto dalam (Masruri, 2014) mengatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan baik dalam waktu biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bentuk pencapaian sesuatu kegiatan diaman dalam kegiatan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Efektivitas juga merupakan pencapaian sesuatu kegiatan dengan tepat dan benar yang sesuai dengan ketentuan dan juga berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Zainudin, 2014) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas yaitu:

- a. Faktor kondisi lingkungan, kondisi ini dapat mempengaruhi tingkat efektivitas melihat dari kondisi suatu lingkungan kerja suatu program, apabila kondisi lingkungan kerja baik maka dapat menghasilkan sesuatu yang baik (*efektif*), akan tetapi jika kondisi lingkungan buruk maka akan dapat menghasilkan kerja yang tidak efektif.
- b. Faktor hubungan organisasi, hubungan organisasi ini dapat mempengaruhi tingkat efektivitas suatu program, jika hubungan komunikasi sesama organisasi berjalan secara baik.

- c. Sumber daya organisasi yang baik untuk implementasi program, semakin baik sumber daya dari organisasi tersebut maka semakin besar juga tingkat dari efektivitas dari suatu program dengan sumber daya yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik juga.
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam hal semakin baik karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dapat menghasilkan suatu kinerja yang baik sehingga tercapainya efektivitas dari program tersebut.

Indikator dari efektivitas menurut pendapat Campbell J.P dalam (Zaenudin, 2014) mengatakan bahwa secara umum pengukuran efektivitas meliputi:

- a. Keberhasilan Program

Keberhasilan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas meliputi program ternak lele, program kerajinan pembuatan keset, program ternak kambing, program kerajinan batik ciprat, program kerajinan batik ciprat. Program tersebut memberikan dampak yang positif bagi penyandang disabilitas.

- b. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program pemberdayaan penyandang disabilitas mempunyai penghasilan uang setiap 3 bulan melalui pemberdayaan ikan lele, kemudian dengan program pemberdayaan terkan kambing setiap setahun sekali, dan kerajinan tangan meliputi kerajinan tangan pembuatan keset, batik dan tasbih bisa digunakan penghasilan uang setiap bulannya.

c. Input dan Output Program

Dampak dari program pemberdayaan penyandang disabilitas mental dapat merubah pola dari kehidupan mereka penyandang disabilitas mental yang dulu tidak memiliki kegiatan dan tidak mendapatkan penghasilan berupa menjadi mandiri. penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri dan mempunyai keahlian dalam menghasilkan kerajinan tanganya dalam pembuatan keset, tasbih dan batik ciprat.

d. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan penyandang disabilitas mental (*down syndrome*) memiliki sumber pendapatan dengan adanya pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan dan sudah bisa membiayai keluarganya untuk sekolah dari penghasilan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Menurut Djohani dalam (Suharto, 2005) pemberdayaan merupakan proses yang memberikan daya atau kekuasaan (*power*) terhadap pihak

yang memiliki lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) terhadap pihak yang berkuasa (*powerful*) sehingga menjadikan keseimbangan.

Menurut pendapat (Mardikanto dan Soebiato, 2017) pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat miskin, marjinal, dan terpinggirkan. Salah satu kelompok termarginalkan adalah para penyandang disabilitas. Pentingnya pemberdayaan bagi disabilitas sebagai upaya membentuk masyarakat yang mandiri baik secara ekonomi, sosial, dan psikologi.

Sedangkan Rappaport juga menjelaskan dalam (Anwas, 2014) bahwa pemberdayaan merupakan salah satu cara dimana masyarakat, organisasi, dan komunitas memiliki tujuan agar bisa menguasai kehidupan. Pemberdayaan (*empowerment*) sendiri menekankan pada kekuasaan, memberikan wewenang, atau pengalih kekuasaan terhadap individu atau masyarakat sehingga bisa mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Jim Ife juga menjelaskan dalam (Anwas, 2014) pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Sedangkan menurut (Mardikanto dan Soebiato, 2017), upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi (*daya*) masyarakat berkembang (*enabling*). Pemberdayaan itu sendiri berarti upaya untuk

membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi (*daya*) yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui langkah-langkah lebih positif dan nyata, memberikan masukan (*input*) kepada masyarakat, dan membuka akses terhadap sumber daya yang tersedia dengan memberi peluang-peluang khususnya kepada masyarakat yang keberdayaannya amat kurang untuk berpartisipasi. Sehingga diperlukannya program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Maksud melindungi adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*)

Menurut pendapat Sumaryadi dalam (Suharto, 2005) juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Terdapatnya suatu komunitas untuk menerima dan memberikan kesediaan pemberdayaan
- b. Adanya pemikiran bahwa pemberdayaan tidaklah diperuntukkan bagi semua orang
- c. Adanya ketergantungan yang sudah menjadi budaya
- d. Terdapatnya dukungan dari para pemimpin penguasa untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya

- e. Memiliki batas dari pemberdayaan
- f. Memiliki kepercayaan terhadap para pemimpin komunitas untuk bisa mengembangkan pemberdayaan dan bisa mengubah persepsi mereka
- g. Pemberdayaan sendiri membutuhkan suport dalam hal sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pendanaan maupun waktu dan tenaga.

Konsep Pemberdayaan menurut Jim Ife dalam (Zubaedi, 2013) konsep pemberdayaan sendiri memiliki hubungan dengan dua konsep pokok yakni meliputi konsep (daya) dan konsep ketimpangan (*disadvantaged*). Pemberdayaan memiliki arti menyediakan sumber daya, memberi kesempatan, serta memberi pengetahuan dan keterampilan terhadap masyarakat untuk bisa meningkatkan sumberdaya yang mereka miliki dalam menentukan masa yang akan datang serta ikut berkontribusi dalam mempengaruhi masyarakat.

Menurut Ginandjar Kartasasmita dalam (Mardikanto, 2015) ada tiga konsep pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan, ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- b. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*)

masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendirisendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalahmasalah yang dihadapinya, dan juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok adalah yang paling efektif dan di lihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Sedangkan menurut (Susilawati, 2016) ada dua cara pendekatan yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu:

- a. Model Medis

Model medis menganggap kecacatan sebagai suatu abnormalitas, sehingga orang yang mengalami kecacatan harus dinormalkan, dikoreksi, ditanggulangi dan disembuhkan, sehingga hambatan yang mereka hadapi di masyarakat dapat ditanggulangi dan membuat pemberdayaan penyandang disabilitas tersebut bisa berjalan tanpa adanya diskriminasi.

- b. Model Sosial

Model sosial disusun berdasarkan pemahaman bahwa penyatuan dari penyandang disabilitas diartikan sebagai proses merobohkan rintangan-rintangan dan menjinakkan ranjau-ranjau sosial. Model ini menekankan

aspek perubahan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang menghambat kemandirian dan pengembangan dirinya.

Tujuan utama pemberdayaan sendiri adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas struktural tidak adil). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Mendorong, memotivasi meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
- b. Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif dalam memperkembangkannya.
- c. Penyediaan bahan masukan dan pembukaan akses peluang. Upaya yang pokok dilakukan agar peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi lapangan kerja dan fasilitasnya.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

3. Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas merupakan pengganti dari istilah penyandang cacat yang dulu lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Istilah ini resmi digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau *The UN Convention on the Rights Of Persons With Disabilities* pada pertemuan Penyusunan Bahan Ratifikasi 28 Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial pada tanggal 29 Maret hingga 1 April 2010. Hal tersebut dilatar belakangi oleh arti dalam istilah penyandang cacat yang dinilai mengandung makna bernuansa negatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tak hanya itu, istilah tersebut juga dipandang dapat mendiskriminasi penyandang disabilitas di lingkungan sosial dimana mereka sering diidentikan dengan kondisi yang lemah tidak berdaya, berpenyakit, dan tidak produktif. Dengan demikian, istilah penyandang disabilitas dipandang lebih konstruktif dan layak untuk digunakan (Ardinata, 2017).

Istilah disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Anak dengan disabilitas atau sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Menurut Kementerian Sosial penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Sedangkan untuk kriteria penyandang disabilitas yaitu:

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
- d. Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
- e. Penyandang disabilitas mental: retardasi mental dan psikotik
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan definisi kecacatan ke dalam 3 kategori, yaitu: "*Impairment, Disability, Dan Handicap*". *Impairment* disebutkan sebagai kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis. Sedangkan *disability* adalah ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. Adapun *handicap*, merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment, disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

Menurut (Ningsih, 2014) terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki

defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu:

a. Disabilitas Mental atau *down syndrome* ini terdiri dari:

- 1) Mental tinggi atau sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- 2) Mental rendah/kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan belajar spesifik atau berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

b. Disabilitas Fisik, kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:

- 1) Kelainan tubuh (tunadaksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) Kelainan indera penglihatan (tunanetra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

- 3) Kelainan pendengaran (tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- 4) Kelainan bicara (tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 5) Tunaganda (disabilitas ganda) penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

G. Definisi Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan bentuk pencapaian sesuatu kegiatan diaman dalam kegiatan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Efektivitas juga merupakan pencapaian sesuatu kegiatan dengan tepat dan benar yang sesuai dengan ketentuan dan juga berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan dan kemandirian kepada seseorang atau kelompok orang dalam lapisan masyarakat yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan mental sehingga terciptanya masyarakat yang berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

3. Disabilitas

Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Disabilitas juga ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya kondisi tidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.

H. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Indikator dari efektivitas menurut pendapat Campbell J.P dalam (Zaenudin, 2014) yaitu:

- a. Keberhasilan program tentang penyandang disabilitas mental (*down syndrome*) yang ada di Desa Karangpatihan menjadi mandiri dan produktif, dengan adanya program pemberdayaan masyarakat disabilitas. Program pemberdayaan disabilitas mental meliputi program budidaya ikan lele yang setiap penyandang disabilitas dibuatkan kolam di halaman rumahnya, ternak

kambing penyandang disabilitas diberikan seekor indukan kambing untuk dipelihara dan kerajinan tangan pembuatan keset, tasbih dan batik ciprat.

- b. Kepuasan terhadap program mengenai kepuasan dari penyandang disabilitas yang sudah mengalami perubahan dengan adanya program pemberdayaan. Penyandang disabilitas sudah bisa membelikan kebutuhan sehari-sehari mereka dengan hasil uang yang diperoleh melalui konsep pemberdayaan bulanan, triwulan dan tahunan.
- c. Input dan output program menghasilkan perubahan terhadap penyandang disabilitas mental dengan adanya program pemberdayaan tersebut, sedangkan untuk outputnya penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri dan mempunyai keahlian dalam menghasilkan kerajinan tanganya dalam pembuatan keset, tasbih dan batik ciprat. Penyandang sudah bisa membiayai keluarganya untuk kehidupan sehari-hari dan membiayai keluarganya untuk pendidikan sekolah.
- d. Pencapaian tujuan menyeluruh memberikan program kepada penyandang disabilitas menjadi mandiri tanpa bergantung dari bantuan orang lain, serta memberikan hal yang positif untuk mereka yang dulunya tidak mempunyai penghasilan sekarang mempunyai penghasilan bulanan, triwulan dan tahunan. Penyandang disabilitas mental (*down syndrome*) juga sudah bisa ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan masyarakat normal.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Mengenai Efektivitas Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (*Down Syndrome*) Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. Menurut pendapat (Muslikh, 2012) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Metode penelitian kualitatif dirasakan sangat tepat untuk penelitian ini, dikarenakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mencari hasil menggunakan pendekatan dengan mencari makna, pengertian, pemahaman, kejadian, fenomena, dan orang yang terlibat maupun tidak terlibat yang diteliti secara menyeluruh dan kontekstual. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana Efektivitas Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (*Down Syndrome*) Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Lokasi penelitian ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam pencarian data.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti sebagai sumber informasi secara langsung pada objek yang diteliti. Adapun data primer yang dibutuhkan peneliti untuk bisa mendapatkan data secara langsung yaitu:

Tabel 1.2
Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Keberhasilan Program Pemberdayaan	Kepala Desa dan Masyarakat	Wawancara
Kepuasan Terhadap Program Pemberdayaan	Masyarakat	Wawancara
Input dan Output Program Pemberdayaan	Kepala Desa	Wawancara
Pencapaian Tujuan Menyeluruh	Kepala Desa	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui data yang sudah ada atau dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Data Sekunder dalam penelitian ini yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yaitu:

Tabel 1.3
Data Sekunder

Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
Peta Wilayah Desa Karangpatihan	Dokumentasi
Profil Desa Karangpatihan	Dokumentasi
Kegiatan Pemberdayaan	Dokumentasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Dalam wawancara yang akan dilakukan peneliti nanti yaitu ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (*Down Syndrome*) Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Karangpatihan (Eko Mulyadi). Pendamping Kerajinan Tangan (Samuji), Pendamping Budidaya Lele (Paimin), Pendamping Ternak Kambing (Teguh Cahyono) dan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Suratun, Wagi, Parmi, Boini, Pairah)

Tabel 1.4
Daftar Narasumber

No	Nama	Instansi
1	Eko Mulyadi	Kepala Desa Karangpatihan
2	Samuji	Pendamping Kerajinan Tangan
3	Paimin	Pendamping Budidaya Lele
4	Teguh Cahyono	Pendamping Ternak Kambing
5	Suratun, Wagi, Parmi, Boini, Pairah	Penyandang Disabilitas

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu proses penelitian yang mengumpulkan informasi melalui sebuah catatan atau dokumen berupa gambar maupun foto. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.5
Data Dokumentasi

Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
Peta Wilayah Desa Karangpatihan	Dokumentasi
Profil Desa Karangpatihan	Dokumentasi
Kegiatan Pemberdayaan	Dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis data kualitatif yang dimana dalam pengertiannya menurut Fossey dalam (Yusuf, 2014) bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebuah proses pengumpulan data dengan mereview dan memeriksa data yang sudah terkumpul kemudian menerangkan atau menjelaskan fenomena dan situasi yang ada. Analisis dapat diartikan sebagai upaya mengolah dan mengorganisir data, memecahnya dalam unit-unit yang lebih kecil, kemudian mencari pola dan tema yang sama (Raco, 2010).

Teknik dalam melakukan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh pendapat Burhan Bungin dalam (Muslikh Bahaddur, 2012) yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, adapun reduksi data dalam penelitian ini yaitu dimana peneliti mencari data informasi terkait Efektivitas Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (*Down Syndrome*) Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, yang di dapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Karangpatihan, Pendamping Pemberdayaan Kerajinan Tangan , Pendamping Pemberdayaan Budidaya Lele, Pendamping Pemberdayaan Ternak Kambing dan Masyarakat Penyandang Disabilitas.

b. Display Data

Data display adalah teknik analisis data yang mengumpulkan informasi yang sebelumnya telah tersusun yang dapat membolehkan untuk pengambilan kesimpulan dan tindakan. Bentuk display data yang biasa di temui dalam penelitian kualitatif adalah berupa, teks naratif, kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Adapun Data Display dalam penelitian ini yaitu data-data yang terkait data primer atau data sekunder yang berkaitan dengan informasi untuk mengetahui Efektivitas Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (*Down Syndrome*) Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. Dari data primer dan sekunder tersebut nanti akan dijadikan Reduksi Data digunakan sebagai analisis.

c. Verifikasi dan Kesimpulan (*Conclution and Verification*)

Verifikasi dan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan yang sudah didapat peneliti dan memberi makna mengenai sesuatu yang telah dilihat dan yang sudah diwawancarai kemudian di verifikasi untuk menyesuaikan data yang didapat agar data tersebut dapat lebih tepat, komprehensif dan objektif. Verifikasi dan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah membandingkan data terkait objek yang diteliti yang dikelompokan berdasarkan tinggi rendahnya jawaban dari narasumber (Reduksi Data) kemudian di analisi dengan menggabungkan data yang didapat dari sumber lain (Data Display) agar hasil dari penelitian dapat menjadi lebih relevan.